

TAJUK RENCANA

POP dan Makna Memahami Sejarah

POP tidak semata berasal dari ka-ta ‘populer’. Tapi POP ini merupakan singkatan dari Program Organisasi Penggerak, yang sedang sangat populer. Dan POP sejatinya tidak terkait pelajaran sejarah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), POP adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Jika kini populer dan menjadi sorotan publik bukan karena program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan dengan dana hibah pemerintah bernilai Rp 595 miliar. Bukan karena yang lolos seleksi akan diberi dana sesuai kategorinya. Untuk kategori Gajah danya hingga Rp 20 miliar, Kategori Macan hingga Rp 5 miliar, dan Kategori Kijang hingga Rp 1 miliar.

Adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang mengawali populernya POP. Karena Persyarikatan yang didirikan 1912 silam ini merasa ada sesuatu yang tidak pas dalam proses seleksi serta kriteria pemilihan lolos evaluasi proposal. Dalam pandangan Muhammadiyah, evaluasi tidak membedakan antara Lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan ormas yang berhak mendapat bantuan pemerintah. Karena itu Muhammadiyah memilih mundur dalam keikutsertaan POP. (KR, 23/7)

Tajam alasan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan Muhammadiyah. Dengan 30.000 satuan didikan yang tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa sejak sebelum Kemerdekaan RI. Sehingga tidak pas kalau dikompetisikan dengan lembaga baru.

Bukan bermaksud mengecilkan makna yang lain. Namun ibarat membandingkan yang ‘tidak sekelas’ adalah tidak pas. Wajar jika muncul pelbagai pertanyaan, mengiring surat pemberitahuan hasil evaluasi proposal POP yang ditandatangani

Direktur Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen

GTK), Iwan Syahril. Sikap Muhammadiyah kemudian diikuti Nahdlatul Ulama dan disusul Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang merupakan asosiasi pengajar terbesar di Indonesia. Semua menyatakan mundur (KR, 25/7) Mundurnya ketiga elemen besar ini apakah tidak akan membuat kehilangan yang signifikan bagi POP? Mengingat POP dimaksudkan sebagai program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sejarah menunjukkan, selama seabad Muhammadiyah juga NU memiliki kekuatan dan telah mengerjakan rakyat untuk menjadi cerdas dan terdidik, baik lewat pendidikan modern ataupun tradisional. Tak pelak, pakar politik Fahry Ali dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua PKB, Muhaimin Iskandar meminta Mendikbud belajar sejarah pengabdian NU dan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah-NU tentu juga PGRI pasti tidak ingin diapresiasi berlebihan. Namun disinilah letak arti penting belajar dan makna memahami sejarah. Sejarah bukan sekadar menghafal tahun sebuah peristiwa.

Mungkin perlu kita ingat dan renungkan pidato terakhir Bung Karno dalam Peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1966 : Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pesan yang menyentuh. Pesan yang mengandung makna sangat dalam. Meski sejarah itu peristiwa masa lalu, tetap selalu ada pelajaran sangat berharga di baliknya. Nadiem Makarim berjanji melakukan evaluasi lanjutan. Namun pengakuan Komisi X DPR yang dikutip pelbagai media mengungkap belum ada payung hukum dan dananya, tidakkah akan mengancam keberlangsungan POP. Jadi, akankah upaya memperbaiki pendidikan di Indonesia kembali tertunda? Atau, jangan-jangan upaya peningkatan kualitas pendidikan masih sekadar cita-cita. *** -o



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 561325 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Etika Baru dalam Bermedsos

KENORMALAN baru atau *new normal* atau sekarang adaptasi kebiasaan baru (AKB) merupakan kehidupan baru yang diharapkan mampu ‘mendamaikan’ hubungan manusia dengan Covid-19 yang mematikan. Adapun konteks damai yang dimaksud adalah proses menjalani rutinitas harian sembari mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu contoh kegiatan yang mengalami kenormalan baru adalah bermedsos. Sebab selama pandemi, penggunaan media sosial turut terkena dampak dari gelombang baru. Hal ini bisa dilihat dari survei yang dilakukan Lembaga Kantar, di mana penggunaan aplikasi Instagram mengalami peningkatan dari minggu ke minggu. Implikasinya, penggunaan media sosial ini akan jauh lebih tinggi pada era kenormalan baru.

Apabila laju bermedsos ini tidak diwaspadai, maka bisa saja sewaktu-waktu akan melahirkan ‘virus’ penyakit mental. Hasil studi Goa et al terkait hubungan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental selama pandemi menunjukkan bahwa, media sosial berperan penting dalam mening-

katkan kasus gangguan mental. Implikasinya, semakin lama menghabiskan waktu dalam bermedsos, maka kasus gangguan mental pun bertambah semakin pesat. Hal ini diperparah dengan banyaknya konten medsos yang berpengaruh kurang baik terhadap kesehatan mental. Mulai dari hoaks, rumor, klaim yang berlebihan hingga kebencian, semuanya sangat berpotensi merusak kedamaian masyarakat.

Jelas perbuatan itu mencerminkan etika bermedsos yang kurang baik, lantaran mencela kerja keras seluruh lapisan masyarakat dalam menerapkan kenormalan baru. Dengan demikian, tingginya kasus kesehatan mental turut menjadi faktor terbesar yang menyebabkan pelonjangan kasus Covid-19. Guna mewujudkan kesehatan mental di masa pandemi, maka publik perlu disejukkan dengan konten-konten yang bersifat positif. Etika baru dalam bermedsos sejatinya perlu dilaksanakan sepenuh hati. □ - o

Habibah Auni
Mahasiswa Teknik
Fisika UGM.

Memaksimalkan Kebijakan Pembubaran

PEMBUBARAN 18 lembaga menjadi cerita unik kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, Presiden meninjau bahwa pembubaran kedelapan belas lembaga tersebut merupakan wujud efektivitas kerja organisasi dan efisiensi anggaran di masa krisis. Pertanyaan utamanya, apakah pembubaran kedelapan belas lembaga ini sebuah langkah tepat? Bagaimana agar kebijakan pembubaran lembaga dapat maksimal di dalam mengatasi krisis Covid-19?

Bagaimanapun juga, pembentukan lembaga-lembaga khusus dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, Badan Restorasi Gambut (BRG), sebuah lembaga yang berfokus kepada permasalahan kebakaran lahan gambut, sebuah persoalan yang selama ini sulit ditangani. Hasilnya, selama periode pertama pemerintahan Jokowi, angka kebakaran lahan gambut menurun drastis. Paling tidak hal ini menunjukkan bahwa penanganan lahan gambut lebih efisien dibandingkan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dua Prinsip

Efisiensi lembaga didasarkan dua prinsip utama, yaitu prinsip struktural dan prinsip fungsional. Prinsip struktural berbicara mengenai perampingan lembaga dengan menitikberatkan kepada besaran struktur di dalam lembaga. Artinya, prinsip ini melihat jika struktur di dalam lembaga semakin banyak dibuat maka semakin banyak pula tugas, pokok, dan fungsi yang harus dijalankan oleh sebuah struktur. Sedangkan prinsip fungsional lebih menekankan pada dampak peningkatan efisiensi kinerja ketimbang pembubaran struktur. Dalam pandangan ini, pembubaran lembaga tidak otomatis meningkatkan efisiensi kerja struktur pemerintahan.

Berkaca dari dua prinsip tersebut, maka sepatutnya publik memperhatikan prinsip fungsional dalam menilai kebijakan pembubaran delapan belas lembaga,

Satria Aji Imawan

ga, utamanya perihal bagaimana prinsip fungsionalitas bekerja. Mari kita lihat dua contoh kasus. Pertama, kita masih ingat bagaimana kasus sinkronisasi dan pemuktahiran data orang terdampak Covid-19. Permasalahan dimulai ketika data orang terdampak berbasis e-KTP yang dimiliki pemerintah daerah tidak sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial



(Kemensos). Tidak mengherankan apabila terdapat kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota dewan yang terdata sebagai penerima bantuan sosial terdampak Covid-19 di Provinsi Banten.

Kedua, persoalan pencairan bantuan sosial Covid-19. Selama krisis Covid-19, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) telah dimaksimalkan untuk memberi bantuan sosial di tengah masa krisis Covid-19. Disadari atau tidak, banyaknya program bantuan sosial tersebut telah menyebabkan kerja struktur menjadi tidak efisien. Akibatnya, ada masyarakat yang menerima bantuan sosial sebanyak dua-tiga kali, sekali, dan bahkan ada yang ti-

dak menerima sama sekali.

Integrasi

Berkaca pada kedua kasus tersebut, pemerintah dapat memaksimalkan konsep integrasi berbasis isu. Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai lembaga yang dibentuk ataupun dibubarkan, namun lebih kepada fungsi yang dibentuk melalui pendekatan isu. Sebagai contoh, permasalahan data dapat diselesaikan dengan integrasi data melalui inisiasi Satu Data Indonesia (SDI). Inisiasi ini dapat dijadikan pijakan tentang bagaimana pemerintah melakukan efisiensi kinerja lembaga berbasis data tunggal yang kredibel dan transparan. Dengan adanya data tunggal, skema-skema bantuan sosial yang membingungkan masyarakat dapat dilebur menjadi beberapa program berbasis kluster isu.

Barangkali langkah tersebut dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kinerja, terutama sebagai tindak lanjut kebijakan pembubaran lembaga. Kebijakan ini harus mampu tidak hanya mendongkrak perekonomian nasional di masa krisis Covid-19, seperti tertuang di dalam Perpres, namun juga dapat menjadi tonggak baru peningkatan efisiensi kinerja pemerintah. Sehingga, apa yang dicita-citakan kita cita-citakan bersama dapat diwujudkan, yaitu membangun pembaharuan sistem bahkan setelah Covid-19 berlalu. □ - o

*)**Satria Aji Imawan MPA**, Asisten Dosen Pascasarjana Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirinkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Menghadapi Moratorium CPNS

Ridlowi

jarang menimbulkan kerancuan dalam komposisi pegawai yang sudah disusun sesuai formasi. Mutasi pegawai tidak dapat hanya dilihat proses pindah semata melainkan terdapat peta, posisi, serta sebaran pegawai yang telah tertata. Melalui penataan inilah formasi CPNS diberikan dan didasarkan. Ketika formasi CPNS ini sudah diberikan maka sudah selayaknya komposisinya dipertahankan.

Kedua, bagi pemerintah pusat, moratorium juga merupakan waktu yang tepat untuk kontemplasi, mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan. Misalnya terkait dengan proses pengusulan dan pemberian formasi CPNS. Proses ini harus dilakukan secara tepat. Jenis, jumlah, dan kualifikasi jabatan yang akan diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara substantif. Formasi yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Waktu moratorium juga harus digunakan untuk mempersiapkan mekanisme sistem seleksi yang kompatibel dengan tanggap darurat Covid-19. Mekanisme pelaksanaan seleksi yang memungkinkan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi seluruh unsur yang terlibat melalui protokol kesehatan yang ketat. Tidak mudah menjalankan agenda besar yang melibatkan jutaan peserta di tengah pandemi, inilah tantangan.

Persiapan

Bagi calon pelamar, masa moratorium harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri secara optimal. Pengetahuan, mental, dan kesehatan merupakan tiga aspek penting yang harus secara betul dipersiapkan. Aspek pengetahuan

terlihat dari kemampuan mengerjakan soal tes serta kemahiran dalam memproyeksikan soal yang akan muncul.

Aspek mental juga perlu diasah. Sesiap apapun amunisi materi yang dikuasai, hal ini tidak akan berguna jika saat pelaksanaan tes tidak optimal. Aspek kesehatan juga menjadi kunci. Jika tidak sehat atau posisi tidak layak untuk beraktivitas secara normal, maka pertempuran telah usai, kalah sebelum bertanding.

Moratorium CPNS sudah diputuskan pemerintah. Sikap bijak sudah selayaknya dikedepankan semua lini dengan mengambil inisiatif sesuai fungsi yang dimiliki. Moratorium bukan hanya seremonial semata. Moratorium ini perlu disambut dengan penuh kesiapan, menilik mana saja yang masih belum aman. Sehingga, keberadaan moratorium bukan menjadi beban namun justru peluang. □ - o

*)**Ridlowi SSos MA**, Pemerhati Kepegawaian, Bekerja di Badan Kepegawaian Negara, Alumnus Magister Psikologi Organisasi UGM.

Pojok KR

Pancasila ideologi terbaik Bangsa Indonesia
* **Jangan coba-coba mengganti.**

Jogjaversitas mudahkan calon mahasiswa baru
* **Ayo belajar ke Yogya**

Tidak benar, 240 siswa SMA hamil
* **Yang pasti, 16-18 tahun adalah usia anak**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftati, MN Hassan. Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’ Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.